

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa. Perkembangan ilmu dan pengetahuan (iptek) yang kini berlangsung amat cepat dan menjadi barometer kemajuan suatu bangsa, membutuhkan SDM berkualitas tinggi (Sibuea 2002).

Menurut Sedarmayanti (2009-59), mengemukakan bahwa “ Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan “. Sedangkan pengertian Sumber Daya Manusia secara umum merupakan daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut tenaga atau kekuatan (energi) atau (power). Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun pengertian sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2009-27) adalah “ tenaga kerja atau pegawai di dalam sesuatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan”.

Sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif, inovatif, dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity dan imagination.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) antara lain adalah faktor kesehatan dan faktor gizi, kedua faktor ini penting karena

seseorang tidak mampu mengembangkan kapasitasnya secara maksimal apabila yang bersangkutan tidak memiliki status kesehatan dan gizi yang optimal.

Akuntansi keuangan telah mengalami perkembangan dengan pesat sesuai dengan kemajuan zaman. Lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat saat ini mulai menaruh perhatian besar terhadap praktik-praktik akuntansi dibanding sebelumnya. Lembaga-lembaga pemerintah saat ini, harus mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi khususnya masyarakat menuntut agar dilakukannya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut . Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlakukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban menjadi subyek pemberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya.

Salah satu untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dengan mempersiapkan laporan

keuangan dengan tepat waktu, pemerintah akan mampu membuat masyarakat tertarik untuk membayar pajak dan keuntungan lainnya adalah untuk akses pengambilan informasi yang berguna yang dapat digunakan untuk membuat berbagai keputusan penting.

Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi dalam laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi yang dipublikasikan tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Bermanfaat atau tidaknya informasi hanya dapat ditentukan secara kualitas dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu organisasi atau instansi. Manusia memegang peran penting didalam pencapaian tujuan organisasi/instansi tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita maupun tujuan organisasi perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan.

Sumber daya manusia yang memiliki peranan yang penting dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia melingkupi keseluruhan pegawai di dalam instansi yang terlibat dalam segala kegiatan instansi baik dari level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan disamping sumber daya yang lain, misalnya modal, material dan mesin. Hal ini karena manusia yang mengelola

sumber daya lainnya yang ada dalam perusahaan, sehingga menjadi bermanfaat. Oleh karena itu, sumber daya manusia sangat penting dalam instansi.

Sumber daya manusia seperti pegawai merupakan harta instansi yang terpenting (Peters & Waterman, 1982). Instansi membutuhkan pegawai untuk kelangsungan kegiatan usaha dan pengembangan produksi. Hal ini dikarenakan, walaupun perencanaan instansi sudah sempurna, namun bila sumber daya manusianya tidak dapat menjalankan tugasnya dengan perasaan senang, maka instansi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal (As'ad, 1999).

Untuk menunjang kegiatan operasional suatu organisasi dalam mengantisipasi kondisi yang akan datang, perlu dilakukan beberapa upaya pemberdayaan sehingga organisasi mampu mempertahankan eksistensinya secara konsisten. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan tersebut antara lain adalah dengan melakukan restrukturisasi di berbagai bidang.

Seiring dengan perubahan lingkungan yang terjadi, organisasi pemerintahan daerah beserta perangkatnya sebagai garis terdepan pemerintahan yang memberikan *public service* kepada masyarakat, harus senantiasa memiliki tingkat responsibilitas yang tinggi terhadap perubahan maupun tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. sebagai suatu organisasi yang dinamis akan selalu meningkatkan produktivitasnya serta mempertahankan hal yang menjadi keunggulan kompetitif, yang membuat organisasi dapat mencapai kinerja yang diharapkan serta memiliki keunggulan kompetitif adalah ketika orang didalamnya melakukan apa yang terbaik dari mereka, apa yang mereka senangi serta kuatnya

faktor kepemilikan secara psikologis dalam melaksanakan dan memberi hasil pada pekerjaan mereka.

Seiring dengan persaingan yang semakin tajam karena perubahan teknologi yang cepat dan lingkungan yang begitu drastis pada setiap aspek kehidupan manusia maka setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan bernilai. Dengan kata lain organisasi tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang memuaskan (*customer satisfaction*) tetapi juga berorientasi pada nilai (*customer value*). Sehingga organisasi tidak semata-mata mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi tetapi lebih pada kinerja dalam proses pencapaiannya. Kinerja setiap kegiatan dan individu merupakan kunci pencapaian produktivitas. Jika dicermati dengan seksama, sejatinya peningkatan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas dalam standar akuntansi pemerintah (SAP), UU No 71 Tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan Sumber daya manusia (SDM) yang komponen untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintah, untuk menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas SDM yang memahami dan komponen dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik, kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dalam organisasi merupakan sesuatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan.

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih semakin lama pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin berpengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah SKPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan. Karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang diambil dari berbagai beberapa sumber ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut : **“laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”** Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib. Kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap keteladanan dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penjelasan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah disebut bahwa pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggung jawab keuangan daerah.

Tujuan dari laporan keuangan seperti yang telah diungkapkan yaitu menyangkut pada posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Tepat waktu didefinisikan sebagai suatu pemanfaatan informasi oleh pengambilan keputusan informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuan untuk mengambil keputusan, oleh karena itu suatu informasi dikatakan tidak relevan jika tidak disampaikan tepat waktu. Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa pelaporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang akan mempengaruhi pemakai informasi dan membuat prediksi dan keputusan.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang peraturan pasar modal dan diperbaharui oleh Bappepam pada tahun 1996 disebutkan bahwa semua

perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara berkala kepada Bapeppam selambat-lambatnya 120 hari.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pajak daerah “**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas masalah penelitian ini akan diteliti dan diidentifikasi sebagai berikut : Karena kinerja sumber daya manusia kurang, menyebabkan bertumpuknya pekerjaan, data-data yang tidak sesuai, sehingga melewati tanggal waktu yang telah ditentukan pemerintah daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pajak daerah ?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pajak daerah ?
3. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pajak daerah ?

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya manusia dan pengendalian internal terhadap pelaporan pengelolaan keuangan pajak daerah dan mengetahui hubungan dari setiap variable yang ada. Serta sebagai syarat kelulusan Program Studi SI Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan Laporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sistem pengendalian internal keuangan pajak daerah.
3. Untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia dan pengendalian internal terhadap pengelola keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan pajak daerah dan apakah pelaporan pengelolaan tersebut tepat waktu.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan menjadikan bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan serta

menambah literatur perpustakaan sehingga memberika manfaat bagi semua pihak dan sebagai acuan bagi mahasiswa selanjutnya untuk menjadikan referensi,.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Indonesia memasuki era pemerintahan daerah yang baru. Maksudnya setiap daerah diberi kewenangan untuk menjelaskan berdasarkan PAD. Perubahan yang cukup fundamental terjadi didalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Salim (1996:35) mengemukakan pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai berikut : **“ kualitas sumber daya manusia adalah nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggung jawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa”**

Soekidjo Notoatmodjo (2003:3) ” **mengatakan kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampua bekerja, berfikir dan keterampilan lainnya.**

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi,mengecek ketelitian dan keandalan data-data.

Aspek pengetahuan tentang Kualitas Laporan Keuangan pun sangat mempengaruhi terhadap langkah langkah apa saja yang harus di lakukan untuk mengambil keputusan setelah dilakukannya analisis secara mendalam. Definisi Laporan Keuangan menurut (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1, 2015) adalah:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Sedangkan definisi Laporan Keuangan Menurut (Birgham F. Eugene dan Houston, 2010). adalah

“Beberapa lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka namun sangat penting juga untuk memikirkan aset nyatanya yang berada di balik angka tersebut.”

Dan unsur unsur Laporan Keuangan yang berkualitas menurut (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1, 2015) adalah **Dapat dipahami, Relevan, Keandalan, dan Dapat diperbandingkan**. Kesadaran publik pun akan berdampak positif untuk dapat mempercayai kualitas pelayanan publik, jika dapat menjalankan amanat yang diberikan oleh Negara tidak di salah gunakan oleh segelintir orang.

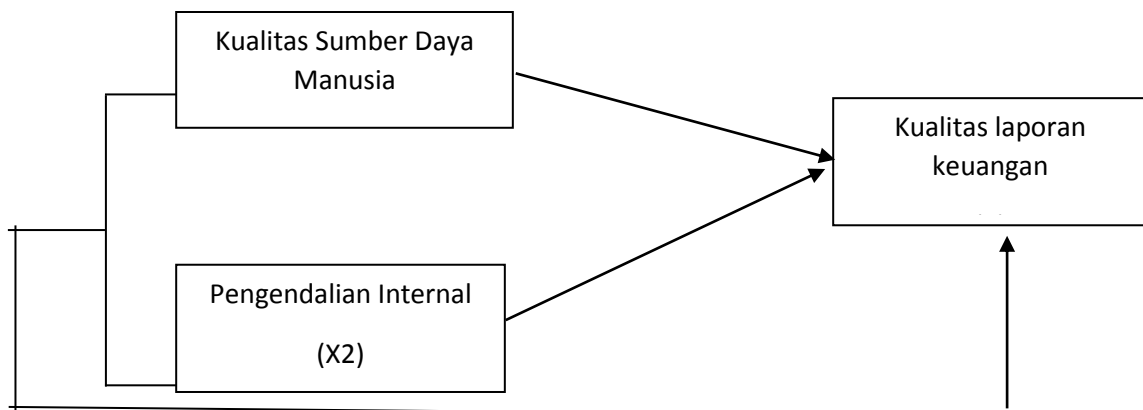
Dan tidak dapat dipungkiri terdapat berita berita yang beredar di masyarakat luas bahwa sedang maraknya terjadi pandangan negatif terhadap manajemen yang ada dalam sebuah perusahaan pelayanan publik mengenai masalah pelaporan keuangan yang sering disalah gunakan oleh segelintir orang.

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengendalian internal maka penulisan secara berurutan mengemukakan hal-hal yang berhubungan mengenai pengendalian internal (**Pratiwi,2014-12**).

Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan juga pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang memasyarakat bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel bebas yaitu. Pengaruh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal akuntansi kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1

Skema kerangka Pemikiran

1.6.1 Studi Empiris

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Ruri Windiastuti (2009)	Pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai hubungan sumber daya manusia, sistem pengendalian internal terhadap kualitas keuangan pemerintah Daerah (studi kasus

			pada DPKAD Kota Bandung).
2	Dimas Rusvianto,Sri Mulyani, Indri Yuliafitri (2018)	Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Hasil penelitian pengujian hipotesis dan interpretasi secara bersama –sama penerapan sistem pengendalian internal da kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.
3	Ni Putu Riski Martini (2018)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian internal akuntansi pada pelaporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.	Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan yaitu sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualiatas informasi akuntansi

			dengan tingkat keyakinan 95%. Sedangkan pengendalian internal akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi dengan tingkat keyakinan 95%.
--	--	--	--

1.6.2 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan beru berdasarka teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data “.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah “ **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah** “.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 11 juni 2020 sampai 11 November 2020.